



Kontestasi Retorika Islam Nusantara di Media Baru

Dini Safitri*

Universitas Negeri Jakarta

*Email: dinisafitri@unj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the contestation of Islamic Nusantara rhetoric in Social Media between two Islamic organizations in Indonesia. The first mass organization was NU as the creator of Islam Nusantara idea and HTI as the repudiation of Islam Nusantara idea. To analyze the text contained in the official web of NU and HTI on Islam Nusantara. Research method is text analysis. The results show that there is contestation between NU and HTI in producing Islamic Nusantara rhetoric in New Media. NU as the largest Islamic organization in Indonesia feels the need to develop the Islamic Nusantara model as a distinctive feature of Islam in Indonesia against the hegemony of radical Islamic values entering Indonesia. The intellectual elite of NU is also widely revealed in its text on the official web of NU, that radical Islamic values are also carried by other Islamic organizations such as HTI which is the international Islamic organization of the Middle East. Meanwhile, HTI elites also produce texts to reject Islam Nusantara because Islam is only one, and invites the Islamic community of Indonesia not to be divided.

Keywords: Rhetoric; Islam Nusantara; New Media

ABSTRAK

Tulisa ini menggambarkan kontestasi retorika Islam Nusantara di media sosial antara dua ormas Islam di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pengusung gagasan Islam Nusantara dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai penolak gagasan Islam Nusantara. Untuk menganalisa teks yang dimuat dalam web resmi NU dan HTI. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah analisis teks dari Teun A. van Dijk yang menghubungkan tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dengan menggunakan retorika argumentasi Stephen Toulmin untuk teks Islam Nusantara di web resmi NU dan HTI. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kontestasi antara NU dan HTI dalam memproduksi retorika Islam Nusantara di media baru. NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia merasa perlu melakukan pengembangan model Islam Nusantara sebagai ciri khas dari Islam di Indonesia untuk melawan hegemoni dari nilai-nilai Islam radikal yang tengah memasuki Indonesia. Sementara itu, elit HTI juga memproduksi teks untuk menolak Islam Nusantara dikarenakan Islam itu hanya satu, dan mengajak masyarakat Islam Indonesia untuk tidak terpecah-belah.

* Tulisan ini pernah dipresentasikan di Seminar Nasional Dakwah, Bandung, 27-29 Oktober 2018

Kata kunci: Retorika; Islam Nusantara; Media Baru.

PENDAHULUAN

Fenomena kontestasi mengenai wacana Islam Nusantara yang diusung petinggi NU di Jakarta, menarik untuk diteliti, karena ada forum ide dan kritik, ada ruang terbuka untuk menyuarakan ide dan gagasan. Apakah itu gagasan menyerang, gagasan membela, ataupun gagasan netral. Dalam forum retorika di media baru, ada partisipasi dalam bentuk adu argumentasi. Masing-masing pihak beretorika, bahwa argumentasinya adalah yang paling benar. Uniknya, argumentasi ini dibangun dalam suasana obrolan di media baru, dimana masing-masing pihak tidak bertatap muka satu sama lain, namun terjadi forum dan dialog yang terjadi melalui jejaring sosial. Karena sifat keterhubungan melalui media baru, maka adu argumentasi ini memiliki peluang besar, untuk terbentuknya model retorika argumentasi baru yang dipengaruhi oleh karakteristik media baru. Namun permasalahan kemunculan model tersebut, perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, seperti apakah tindak tutur dari obrolan tersebut, bagaimana situasi mengambil peran retorikanya, wacana mana yang mendapat perhatian lebih dari situasi retorika yang menjadi fokus obrolan?

Penelitian sebelumnya mengenai Islam Nusantara sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang ditulis oleh Astuti & Hanum Jazimah Puji (2017) yang berjudul *Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural*. (Astuti & Hanum Jazimah Puji, 2017) dalam penelitiannya memakai pendekatan budaya untuk melihat bagaimana masyarakat yang beragama Islam di Nusantara menjalankan kehidupan beragamanya secara Islam, dengan cara memberikan nuansa baru terhadap Islam, namun tetap tetap tidak menghilangkan kemurnian dari agama Islam itu sendiri.

Penelitian lainnya tentang Islam Nusantara juga dilakukan oleh Akhiyat (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Akhiyat hampir mirip dengan penelitian Astuti & Hanum Jazimah Puji (2017) di atas, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan budaya. Namun fokus dalam Akhiyat (2017) adalah memaparkan tentang sikap ortodok humanis penganut Islam di Nusantara.

Penelitian lainnya tentang Islam Nusantara dalam nuansa yang agak berbeda dari kedua penelitian di atas dilakukan juga oleh Chalik (2016). Penelitian Chalik ini lebih luas cakupannya dari dua penelitian sebelumnya. Hal tersebut karena Chalik membuat perbandingan antara konsep ideologi Islam Nusantara dan menariknya sebagai solusi atas berbagai persoalan dunia Islam, seperti ISIS dan Al Qaeda.

Penelitian selanjutnya tentang Islam Nusantara juga dilakukan Taja (2016). Penelitian Taja menggambarkan mengenai Peran Ulama NU, khususnya Ulama NU Jawa Barat dalam menyebarkan nilai-nilai Islam Nusantara melalui jalur Pendidikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian Susanto,

Edi, & Abadi (2015) mengenai peran pesantren dalam menjaga warisan peninggalan dari Islam Nusantara yang di bawa oleh Wali Songo. Namun, penelitian ini juga menggambarkan tentang perkembangan organisasi Islam lainnya yang tidak toleran dengan tradisi lokal masyarakat Nusantara. Kemudian penelitian lainnya juga berusaha mengembangkan penelitian tentang Islam Nusantara. Salah satunya adalah Basid (2017) yang meneliti tentang Islam Nusantara dari sisi historis, yaitu perkembangan Islam Nusantara dari masa setelah melewati era tradisional sampai menjadi studi baru dalam penelitian modern. Dan penelitian ini ada memiliki unsur kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun lebih banyak pada unsur kebaruannya.

Kesamaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini akan memaknai kontestasi Islam Nusantara dari sisi historisnya. Dimana penelitian ini akan banyak menganalisis teks tentang Islam Nusantara NU, yang mengangkat mengapa Islam Nusantara menjadi sebuah retorika yang kembali digalakkan oleh NU, untuk disebarluaskan kepada masyarakat muslim Indonesia. Dari teks-teks yang mengandung nilai historis retorika Islam Nusantara, kemudian melahirkan kebaruan dari penelitian ini. Yaitu teks-teks tersebut mendapat kontestasi dari teks yang diproduksi oleh organisasi Islam terbaru yang mengadopsi nama dan paham dari organisasi timur tengah, yaitu HTI. HTI menolak retorika Islam Nusantara NU dan melawannya dengan teks menolak retorika Islam Nusantara NU di web resmi mereka.

Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, untuk mengetahui tindak tutur Islam Nusantara yang diproduksi oleh elit intelektual NU dan HTI di Web Resmi. Kedua, untuk mengetahui cara elit intelektual NU dan HTI memanfaatkan momentum situasi retorika untuk memproduksi retorika argumentasi Islam Nusantara. Ketiga, untuk membuat model argumentasi Islam Nusantara dalam retorika argumentasi elit intelektual NU dan HTI dalam teks kolom Web Resmi.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan situasi retorika argumentasi Islam Nusantara di media baru. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat membuat teori atau model wacana baru, dari hasil pengembangan dan penggabungan teori dan model yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu situasi retorika, tindak tutur, dan model retorika argumentasi.

Pengembangan lebih lanjut penggunaan media baru sangat menarik untuk diteliti untuk mencari tahu gambaran retorika dan tindak tutur organisasi masyarakat (ormas) Islam mengenai wacana yang diusung kelompoknya. Sebagaimana diketahui, Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki banyak ormas Islam yang masing-masing mengusung wacana kelompoknya.

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan keterhubungan antara satu konsep dengan konsep lain, antara satu teori dengan teori lain, sehingga diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman kepada pembaca

mengenai retorika politik dan sosial di media baru, khususnya yang diproduksi oleh elit intelektual NU dan HTI. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, digunakan model argumentasi Toulmin, teori situasi retorika dari Bitzer (1986), dan tindak tutur (Austin, 1962). Sebagai tambahan atas retorika Islam Nusantara yang juga tidak hanya mengandalkan ruang maya, namun juga fokus pada gerakan intelektual yang memiliki basis pada kampus dan lingkungan pendidikan, maka peneliti juga memasukan teori wacana pedagogi yang dikemukakan Basil Bernstein, yaitu kelas, kode dan kontrol.

Penelitian ini menggunakan model argumentasi Toulmin (2003) untuk menemukan bagaimana strategi argumentatif elit intelektual NU dan HTI mempekerjakan bahasa, bagaimana tingkat argumen elit intelektual NU dan HTI merangkai narasi dalam paragraf sehingga tersusun menjadi teks pada kolom. Analisis ini digunakan untuk dapat menilai seberapa efektif atau tidak sebuah argumen. Karena metode Toulmin tidak hanya, mencari tahu tingkat efektivitas sebuah argumen, tapi juga berusaha mengkritisi argumen itu sendiri. Metode argumentasi Toulmin, membaca teks dengan membagi argumen menjadi bagian-bagian yang berbeda, terdiri atas klaim, alasan, dan bukti, sehingga kita bisa membuat penilaian seberapa baik bagian-bagian tersebut bekerja sama.

Digunakan juga teori situasi retorika agar dapat mengetahui situasi retorika yang dialami oleh elit intelektual NU dan HTI di Web Resmi. Teori situasi retorika digunakan sebagai analisis awal untuk melihat konteks dimana elit intelektual NU dan HTI melakukan retorika dalam bentuk perdebatan argumentasi di media baru yang diproduksi lebih banyak, disebarkan lebih sering dan jangkauan keterhubungannya lebih luas.

Teori situasi retorika dalam penelitian ini mengacu pada Bitzer (1986). Bitzer mengatakan situasi retorika adalah konteks di mana pembicara membuat retorika. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana ormas Islam membuat retorika, dari mulai menyusun konsep perencanaan, memilih kata, menyusun dan menyajikan retorika argumentasi di media baru. Dalam proses membuat retorika tersebut, ormas Islam dihadapkan dengan sejumlah situasi, diantaranya konteks sejarah, dimana terdapat peristiwa yang menuntut ormas Islam memproduksi retorika untuk kepentingan organisasi. Berdasarkan situasi retorika pula, ormas Islam dihadapkan untuk melakukan penyebaran retorika melalui media baru. Situasi tersebut, membuat ormas Islam memproduksi tindak tutur dalam bentuk retorika dan kemudian menyebarkan melalui media baru. Karena sifat media baru yang terbuka, maka elit, kader atau simpatisan ormas Islam dihadapkan dengan ruang terbuka, forum kritik dan adu argumentasi di media baru.

Gambaran situasi di atas, tidak terlepas dari argumen (Bitzer, 1986), yang mengatakan karya retorika adalah pragmatis. Dibuat demi sesuatu di luar dirinya, sesuai dengan fungsi situasi retorika, melakukan beberapa tugas, seperti mengubah realitas. Dalam penelitian ini, ormas Islam Indonesia dihadapkan pada

situasi retorika, ada peristiwa, produksi teks yang massif pada media baru dengan urgensi membuat tindak tutur untuk mengubah realitas. Seluruh komponen ormas Islam, dari elit, kader dan simpatisan, berusaha mempersuasi warga media baru, melalui ruang virtual yang terbuka dengan tindak tutur ilokusi. Dengan harapan, melalui retorika argumentasi tersebut, dapat mengubah situasi secara alami, dan dianggap telah melakukan tindakan emansipatif (partisipatif) untuk penyelesaian peristiwa situasional yang tidak diinginkan terjadi.

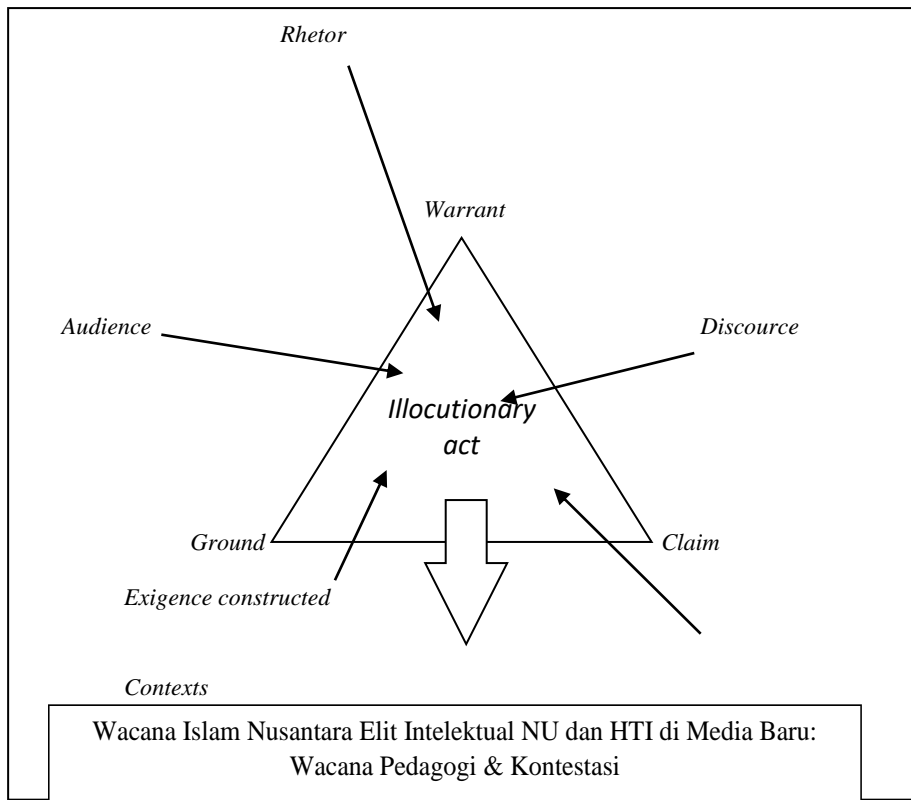
Selain itu, dengan cara partisipasi dengan situasi, ormas Islam berharap dapat memperoleh makna akan eksistensinya sebagai sebuah ormas yang diperhitungkan oleh masyarakat. Namun dalam interaksi tersebut, terdapat sejumlah kendala, berupa keyakinan, sikap, dokumen, fakta, tradisi, gambar, minat, motif dan sejenisnya, yang menghalangi proses persuasi. Terlebih lagi, bila situasi retorika tidak mencapai titik temu berupa tindakan tutur perlokusi. Untuk itu, dibutuhkan retorika argumentasi yang disusun berdasarkan klaim tindak tutur dengan sejumlah bukti dan dukungan yang kuat, dengan mengembangkan kebutuhan yang paling mendesak, yaitu membanjiri informasi kepada warga media baru dengan menciptakan ratusan ribu pesan. Dari pesan yang banyak tersebut, diharapkan akan mengubah situasi, dari situasi cacian menjadi pujian, dari krisis menjadi stabil, dari yang dibenci menjadi yang disukai, dari yang terburuk menjadi yang terbaik, dari yang tidak dipilih menjadi pilihan.

Teori tindak tutur (Austin, 1962) digunakan dalam penelitian ini, karena kemampuannya dalam menggambarkan realitas, melalui praktek linguistik dalam situasi dimana orang menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan. Berdasarkan situasi tersebut, tindak tutur dibedakan berdasarkan ujaran. Ujaran tersebut berbeda-beda, berdasarkan interaksi antar penutur dalam situasi dan tempat tertentu. Diantara sekian banyak situasi dalam berbagai bentuk tindak tutur, terdapat situasi retorika, dimana penutur dihadapkan pada suatu ujaran yang mengandung tindakan retorika yang mempertimbangkan aspek situasi retorika. Pada penelitian ini, elit intelektual NU dan HTI memproduksi tindak tutur karena ada urgensi dari situasi retorika, mengenai Islam Nusantara, sebagai istilah yang penting bagi umat Islam Indonesia dalam interaksi sehari-hari.

Setelah konteks diketahui, untuk memperoleh makna dan karakter retorika, maka diperlukan telaah mengenai tindak tutur elit intelektual NU dan HTI. Apakah retorika argumentasi yang diproduksi elit intelektual NU dan HTI merupakan tindakan lokusi, ilokusi atau perlokusi. Telaah tersebut, kemudian dipertajam dengan menggunakan analisis konsep konter hegemoni dari (Gramsci, 1995), dan analisis hubungan kekuasaan dalam wacana, bahasa dan pengetahuan dari Afandi (2011). Setelah itu, dipaparkan temua penelitian dalam sebuah teori baru. Teori tersebut, setelah di telurusi, merupakan pengembangan dari teori wacana pedagogi yang dikemukakan Basil Bernstein, yaitu kelas, kode dan kontrol.

Teori ini dipakai untuk menjelaskan fenomena dibalik ide retorika Islam

Nusantara. Dalam pembuatan retorika Islam Nusantara di media baru, NU dan HTI memiliki dasar dan metode yang menurut mereka, efektif untuk menyebarluaskan retorika. Dasar penyusunan retorika adalah kelas dan kode. Kelas merupakan tempat dimana ide itu muncul, di diskusikan, sampai menjadi kode yang di buat teorisasinya dan siap untuk dimunculkan dalam bentuk retorika. Sedangkan kontrol dilakukan sebagai metode agar retorika Islam Nusantara tersebut, tetap sesuai dengan ide aslinya, seperti saat ide dimunculkan, sekaligus sebagai metode evaluasi retorika yang telah disebarluaskan.



Gambar 1: Kerangka Konsep Wacana Islam Nusantara Elit Intelektual NU dan HTI di Media Baru

Sebagai suatu disiplin, metode retorika memiliki metode ilmiah yang dibenarkan secara filosofis, karena menyediakan prinsip, konsep, dan prosedur mengenai perubahan pada kenyataannya. Retorika juga memiliki objek yang sah untuk diinvestigasi, dan memiliki surat perintah filosofis sebagai disiplin praktis. Status teori retorika saat ini adalah studi tentang setiap jenis simbol dan bahasa, sehingga memiliki hubungan dengan teori tindak tutur. Teori tindak tutur yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang berasal dari Austin (1962). Menurut

Austin (1962), teori tindak tutur adalah salah satu teori yang memposisikan bahasa sebagai suatu yang penting dan dihubungkan dengan situasi. Untuk itulah digunakan teori tindak tutur untuk mendampingi teori retorika dalam meneliti retorika Islam Nusantara yang dibuat dan disebar oleh elit intelektual NU dan HTI di media baru, yaitu web resmi.

Gambar 1 menjelaskan situasi retorika yang terjadi di media baru, mengenai teks, yang dibuat oleh elit intelektual NU dan HTI mengenai retorika Islam Nusantara yang dimuat di web resmi. Tindak tutur perlokusi, sebagai tingkatan yang berada dalam tujuan retorika, yaitu menggunakan simbol manusia secara persuasif untuk mempengaruhi orang-orang disekitar, tidak selamanya berjalan sesuai dengan kehendak penutur, karena dihadapkan dengan kendala dari situasi retorika. Diharapkan dengan konsep ini, dipaparkan secara baik, makna di balik data yang ditampilkan elit intelektual NU dan HTI, yaitu konstruksi wacana pedagogi yang dituturkan oleh elit intelektual NU dan HTI, sekaligus mengembangkan teori retorika yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Toulmin. Sebelumnya, penelitian mengenai media baru sebagai media yang efektif untuk komunikasi politik dan sosial telah banyak dilakukan, namun belum ada yang meneliti mengenai retorika Islam Nusantara yang dilakukan elit intelektual NU dan HTI dengan menggunakan media baru.

Selain pemaparan hasil penelitian dengan menggunakan model argumentasi Toulmin, Situasi Retorika (Bitzer, 1986), dan Tindak Tutur (Austin, 1962), agar lebih mendalam, dimasukkan analisis hegemoni dan konter hegemoni dari Antonio Gramsci (1995) untuk menganalisis fenomena kontestasi wacana Islam Nusantara antara NU dan HTI. Dalam wacana Islam Nusantara NU, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki hegemoni dalam bentuk dominasi wacana dan budaya. Bentuk dominasi NU ini, bila dibaca melalui teori hegemoni (Gramsci, 1995), bisa dilakukan melalui manipulasi kultur sosial, dengan menggunakan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan nilai NU, sehingga secara sadar membuat wacana untuk dapat diterima kelas-kelas lainnya sebagai norma umum dan ideologi yang berlaku secara universal yang dikenal sebagai *common sense*, di mana nilai-nilai tersebut pada dasarnya akan menguntungkan NU sebagai kelas yang berkuasa.

Di sisi lain, usaha untuk melawan pengaruh hegemoni ini dijelaskan Gramsci (1995) sebagai konter hegemoni, yang memunculkan satu pandangan dan nilai-nilai alternatif pada masyarakat yang bertujuan untuk menentang cara pandang dominan yang melanggengkan marjinalisasi kelas dominan terhadap kelas sub altern. (Gramsci, 1995) memandang bahwa konter hegemoni merupakan bentuk penciptaan hegemoni tandingan terhadap hegemoni dominan yang ada, sehingga bentuk-bentuk aksi yang muncul dalam konter hegemoni juga dikembangkan melalui cara-cara yang persuasif. Dalam penelitian ini, diwakili oleh HTI. Menurut Gramsci (1995), pergerakan konter hegemoni, pada awalnya bukanlah kelompok radikal atau ekstremis yang memilih menggunakan cara-cara

kekerasan atau paksaan dalam melawan hegemoni yang ada. Mereka, memulainya dengan usaha persuasi, kampanye, hingga propaganda untuk meyakinkan dan menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya mereka berada dalam penindasan hegemoni oleh kelas yang dominan yang kemudian harus dilawan. Cara-cara ini juga dilakukan oleh HTI, walaupun banyak yang mengatakan bahwa HTI adalah ormas Islam yang radikal di Indonesia. Seperti yang ditulis dalam salah satu web NU Jombang, yang memasukan HTI sebagai gerakan Islam radikal di Indonesia (NU Jombang, 2013).

Gramsci menggambarkan adanya *war of position* untuk menggambarkan gerakan konter hegemoni, yang juga berusaha memperoleh dukungan, serta meraih konsensus dari masyarakat, untuk melawan hegemoni yang ada. Mereka berusaha mengambil alih posisi kelas hegemoni dominan, melalui kekerasan maupun cara damai. Usaha perebutan posisi dominan tersebut, digambarkan Gramsci sebagai *war of manouvre*, yang secara umum dapat dipandang sebagai satu bentuk revolusi politik dan sosial. Gramsci menggambarkan dalam konter hegemoni akan terdapat dua tataran proses aksi, yaitu tahap *national-popular*, dan tahap *internationalist* (Gramsci, 1995)).

Gramsci berpendapat gerakan konter hegemoni yang efektif, lebih dahulu menggunakan lingkup nasional untuk memperoleh kekuatan massa. Apabila gerakan tersebut memiliki prasyarat untuk meraih kekuatan dari negara-negara lainnya, maka gerakan tersebut naik ke tahapan konter hegemoni kedua, sebagai gerakan *internationalist*. Dalam setiap hegemoni dan gerakan konter hegemoni, terdapat aktor utama yang memiliki peran paling utama, yaitu kaum intelektual. Kaum intelektual yang pertama kali mengalami kesadaran kelas dan mengenali adanya bentuk hegemoni yang sedang menindas suatu kelas, dan kemudian menjadi bagian terpenting dalam *war of position* di mana kaum intelektual, yang melanjutkan kesadaran kelas terhadap seluruh kelas yang ditindas, dan kemudian memilih strategi dan memimpin *war of manouvre* dalam upaya menjatuhkan kelas dominan yang berkuasa (Gramsci, 1995).

Gramsci menilai, tidak ada organisasi tanpa intelektual. Ia juga menjelaskan ketiadaan aktor intelektual sebagai hilangnya aspek teoritis yang merupakan dasar pergerakan dari semua organisasi yang efektif. Gramsci membagi kaum intelektual menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah intelektual tradisional, yang merupakan intelektual otonom yang bebas dari kelompok sosial dominan dan memisahkan intelegensia dari tatanan borjuis. Mereka dideskripsikan sebagai pemimpin intelektual dalam suatu *given society*. Contohnya antara lain rohaniawan, filsuf, artis, hingga *public figure*. Tipe kedua adalah intelektual organik, yang berlawanan dengan para tradisional. Berasal dari kelas tertentu dan memiliki keterikatan identitas dengan kelas yang dibelanya. Berbeda dengan para tradisional yang otonom dan independen, mereka berpihak pada salah satu kelas, dan berperan menciptakan homogenitas dan kesadaran akan fungsinya. Tipe kedua ini bergerak untuk mewujudkan kemajuan intelektual

massa (Gramsci, 1995).

Pada penelitian ini, objek penelitian adalah teks yang ditulis elit intelektual NU dan HTI. Sebagai aktor utama dalam penyebaran wacana, elit intelektual NU dan HTI merupakan gabungan dari kedua tipe intelektual yang dikemukakan oleh Gramsci diatas. Mereka masuk kepada tipe tradisional, karena dikenal sebagai rohaniawan, dan juga memiliki keterikatan identitas dan kelas dari organisasi yang diikutinya. Sebagai intelektual, mereka juga memiliki kekuasaan membuat wacana yang menjadi pokok pengetahuan dan makna, seperti yang dikemukakan (Foucault, 2007). Menurut Foucault, akhir abad ke-18, pasca revolusi Prancis sampai dengan pertengahan abad 20, terutama saat Perang Dunia II, sejarah dijadikan wacana ilmiah dimana manusia menjadi subjeknya. (Foucault, 2007) melihat hal tersebut sebagai sebuah hubungan diskursus antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan, dalam hal menemukan yang benar dan yang palsu. Menurut Foucault, hal tersebut, dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Oleh karena itu, Foucault mengatakan tidak mungkin pengetahuan adalah sesuatu yang netral dan murni. (Foucault, 2007) memandang terjadi korelasi antara konsep kekuasaan dan pengetahuan. Menurutnya pengetahuan mengandung kekuasaan, begitu juga kekuasaan mengandung pengetahuan. Penjelasan ilmiah yang satu, berusaha menguasai dan menyingkirkan penjelasan ilmiah yang lain (Afandi, 2011).

Hal lainnya, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi, digunakan untuk memaksakan suatu hal kepada masyarakat. Oleh karenanya, walaupun zaman telah memakai teknologi tinggi, tetap akan ada pemaksaan. Fenomena tersebut menunjukkan kemajuan peradaban, yang hanya merubah instrumen yang dipakai untuk berkuasa. Oleh karena itu Foucault (2007) juga mendalami arkeologi. Menurutnya arkeologi merupakan sebuah ilmu yang dapat dipakai untuk menguji arsip sejarah. Menurutnya, Arsip sejarah merupakan sebuah sistem yang memberi status quo kepada pernyataan sebagai sebuah peristiwa atau benda bersejarah, yang memiliki fungsi strategis untuk menguasai kehidupan sosial dan budaya dalam sebuah wacana yang dinyatakan. Namun, wacana akan mengalami perubahan dan bertransformasi didalam sejarah. Hal tersebut terjadi karena wacana akan selalu bergesekan dengan wacana lainnya. Oleh karena itu, Foucault (2007) mengatakan wacana bukan diskursus yang apriori sebagaimana linguistic. Wacana adalah diskursus yang fungsional dan praktis (Foucault, 2007). Begitupula dengan wacana Islam Nusantara, ia adalah wacana yang bergesekan dengan wacana yang lain. Bagi NU dan HTI, wacana Islam Nusantara dapat berubah dan bertransformasi dalam sejarah. Wacana Islam Nusantara juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan ideologi Islam sebagai alat untuk berkuasa oleh NU dan HTI.

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme kritis. Konstruktivisme kritis merupakan perluasan dari paradigma konstruktivisme, yang menentang positivisme dan menegaskan bahwa tidak ada yang mewakili tujuan dan

perspektif yang netral. Konstruktivisme kritis merupakan penggabungan pandangan dari konstruktivis atau konstruksionis dengan epistemologi kritis, yang dikembangkan oleh Frankfurt *School*. Konstruktivisme kritis mendorong pemikiran kritis dan kritis dalam proses penelitian. Paradigma ini berdasarkan pemahaman bahwa pengetahuan tentang dunia adalah interpretasi dari orang-orang, yang dibuat dalam ruang yang dikontekstualisasikan (Kincheloe, McLaren, & Steinberg, 2011: 163–177).

Konstruktivisme kritis menyatakan bahwa konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, membangun perspektif kita di dunia, diri, dan lainnya. Konstruktivisme kritis secara ontologis, berusaha untuk memahami bagaimana pengaruh dinamika sosio-historis membentuk sebuah objek penyelidikan. Konstruktivisme kritis secara epistemologis mengeksplorasi bagaimana dasar-dasar pengetahuan tentang konteks tertentu mengelilingi obyek penyelidikan (Kincheloe, 2005).

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditandai dengan tujuan penelitian yang berhubungan dengan memahami beberapa aspek kehidupan sosial yang menghasilkan kata-kata, bukan angka, sebagai data untuk analisis. Metode penelitian kualitatif terjadi karena perubahan paradigma dalam memandang sebuah fenomena. Penelitian kualitatif bertolak pada paradigma fenomenologis, dimana objek penelitian dibangun pada situasi yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Penelitian kualitatif berasumsi bahwa penelitian dilakukan pada lingkungan yang alamiah dan langsung kepada tindakan atau interaksi manusia dalam memaknai dan menginterpretasikan kejadian social. Penelitian kualitatif tidak dilakukan pada lingkungan yang artifisial, seperti eksperimen.

Penelitian kualitatif mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aturan alam manusia, dengan cara mencoba untuk memahami dan menafsirkan fenomena dalam pemaknaan (Denzin & Lincoln, 2005: 3). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memaparkan secara mendalam mengenai retorika Islam Nusantara yang dituturkan elit intelektual NU dan HTI di media baru, yaitu web resmi.

Metode dalam penelitian ini adalah retorika argumentasi Stephen Toulmin untuk teks Islam Nusantara di web resmi NU dan HTI. Metode ini dipilih karena penelitian ini, meneliti teks pada kolom di web resmi ormas Islam NU dan HTI. Teks kolom yang diteliti pada web resmi NU ada 40 teks dan HTI ada 4 Teks. Metode ini merupakan bagian dari analisis teks. Inti analisis Van Dijk didapatkan dengan menggabungkan ketiga dimensi (teks, kognisi dan konteks social, ke dalam satu kesatuan analisis. Dimensi teks meneliti struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dimensi kognisi sosial mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi penulis sebagai individu. Dimensi konteks sosial mempelajari bangunan

wacana yang berkembang dalam masyarakat terhadap suatu masalah tertentu. Dan metode retorika argumentasi Stephen Toulmin juga menghubungkan ketiga dimensi tersebut, yaitu dimensi teks, kognisi dan konteks sosial. Dan dengan kehadiran media baru, beragam pendapat disampaikan dan disebarakan melalui media baru, diantaranya adalah wacana Islam Nusantara. Namun penelitian ini hanya membatasi pada retorika Islam Nusantara pada web resmi NU dan HTI, karena terdapat persaingan (kontestasi) dalam menyampaikan pendapat mengenai wacana Islam Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Historis Islam Nusantara Dalam Teks NU Versus Retorika Kontestasi Dalam Teks HTI

Islam Nusantara merupakan tema dari Muktamar NU ke 33 yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015. Namun sebelum muktamar di gelar, tema Islam Nusantara tersebut sudah ramai diperbincangkan, baik dalam kalangan internal NU maupun kalangan eksternal NU. Dalam kalangan internal NU, banyak terbentuk forum diskusi Islam Nusantara di media sosial. Bahkan web NU sendiri menurunkan berita mengenai forum tersebut, seperti berita yang dimuat pada (10/04/2015), mengenai Nahdliyin Nusa Tenggara Barat di grup Black Berry Messenger berjudul “Komunitas Bintang Sembilan (Kombinasi) NTB”. Merujuk pada tanggal berita tersebut, ide Islam Nusantara sudah lama menjadi wacana NU. Bahkan NU, sudah membuka program studi (prodi) Islam Nusantara pada Program Pascasarjana STAINU Jakarta. Dengan demikian, persiapan untuk menjadikan Islam Nusantara menjadi tema Muktamar ke-33, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Berbagai teks di buat dalam web NU, baik dalam bentuk berita, maupun opini. Bahkan di luar web NU, NU juga membuat web khusus yang berisi Islam Nusantara, yaitu www.IslamNusantara.com. Namun dalam penelitian ini, difokuskan pada teks NU di web resmi NU, dan hanya pada teks 'Kolom' yang merupakan tulisan opini dari elit intelektual NU seluruh Indonesia, mengenai Islam Nusantara. Teks yang berhasil penulis kumpulkan, merupakan hasil penelusuran penulis, pada saat Islam Nusantara mulai di retorika kan di web NU, yaitu pada tahun 2011, dan dibatasi pada teks yang dimuat pada (21/10/2015), yaitu pada teks yang memuat opini mengenai hari santri dan miniatur Islam Nusantara. Ada 40 teks 'kolom' NU yang menjadi objek penelitian.

40 teks tersebut dianalisis menggunakan retorika argumentasi Toulmin, kemudian diambil inti sari tindak tutur dari 40 teks tersebut. Dari analisis tersebut, ditemukan adanya wacana pedagogi dalam retorika argumentasi elit intelektual NU dan HTI mengenai Islam Nusantara. Teori mengenai wacana pedagogi, dikemukakan oleh Basil Bernstein. Menurut Bernstein, wacana pedagogi

terdiri atas dari kelas, kode dan kontrol. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai wacana pedagogi, dalam bagian ini akan lebih dahulu dipaparkan analisis Teks NU mengenai retorika Islam Nusantara, untuk itu, dibuat tabel kategorisasi per teks, mengenai unsur yang terdapat dalam retorika argumentasi Toulmin yang terdiri atas *Ground*, *Warrant* dan *Claim*.

Elit intelektual HTI memproduksi tema Islam Nusantara untuk menegasi Islam Nusantara NU. Tidak banyak teks yang diproduksi, karena bukan fokus dari perjuangan HTI. Produksi teks Islam Nusantara, hanya sebagai respon terhadap wacana Islam Nusantara yang diusung oleh NU. Elit intelektual HTI merespon atas maraknya diskusi seputar wacana Islam Nusantara, yang ramai dituturkan di masyarakat, khususnya pada ruang diskusi terbuka, yang terdapat di media baru. Respon tersebut, terkait keramaian debat yang melibatkan wacana Islam Nusantara yang ikut mempersoalkan *khilafah* dalam eksplikasi Islam Nusantara. Sementara bagi HTI, *khilafah Islamiyah* merupakan fokus perjuangan gerakannya, hadir di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sama seperti produksi teks di NU, fokus pada teks 'Kolom' HTI yang mengangkat tema Islam Nusantara. Ditemukan empat artikel terkait Islam Nusantara, pada teks 'Kolom' HTI. Selain di web resmi HTI, tulisan tersebut juga diterbitkan dalam versi cetak di malajah *Al Waie*.

Keempat teks tersebut, walau tidak sebanyak teks 'Kolom' NU, sudah mewakili cara pandang elit intelektual HTI mengenai Islam Nusantara. Elit intelektual HTI merespon isu Islam Nusantara sebagai negasi dari cara pandang NU, yang melihat Islam Nusantara akan memecah belah Islam, dan bertujuan untuk membendung penerapan syariat Islam secara total oleh negara.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan *Ground*, *Warrant* dan *Claim* antara teks NU dan HTI dalam memandang Islam Nusantara (IN). Pada *Ground* yang dikemukakan oleh penulis teks NU, Para penulis merasa terpanggil untuk menulis Islam Nusantara karena ramainya tema Islam Nusantara diperbincangkan, namun banyak pihak yang salah menafsirkan maksud dari wacana IN tersebut. Oleh karena itu, para penulis yang merupakan elit intelektual NU, memaparkan IN dengan mengaitkan Tema Islam Nusantara dalam muktamar NU sebagai modal awal mengkampanyekan keIslaman ala Nusantara, disertai Penjelasan Islam Nusantara sebagai tema kajian yang dapat dioperasionalisasikan dalam ranah akademik, serta meluruskan kesalahpahaman terhadap Islam Nusantara dengan pemaparan strategi kedaulatan kebudayaan, dan peradaban. Diantara penjelasan IN yang mengemuka adalah pemaparan bahwa di Nusantara, ulama jarang terbebani oleh permintaan untuk menegakkan hukum Islam terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain. Penjelasan ini, mendapat perlawanan dari HTI, yang memperjuangkan penegakan hukum Islam di Indonesia.

Ditemukan ada lima garis besar tema tulisan untuk memaparkan IN, yaitu: Pertama, siapa yang mengelola wacana IN. Kedua, apa saja materi yang

digunakan untuk menjelaskan Islam Nusantara. Ketiga, Media partner yang digunakan untuk menyebarluaskan IN. Keempat, kendala yang dihadapi IN. Dan kelima, Implikasi Islam Nusantara. Sementara itu *ground* dalam teks HTI, menjelaskan latar belakang mengapa HTI harus melawan wacana IN. Pertama, karena wacana IN digembar-gemborkan oleh orang-orang penting di Indonesia, yaitu kalangan elit intelektual, birokrat dari Kementrian Agama, politisi, dan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakata Islam, namun ternyata memiliki tafsiran yang bertentangan dengan Islam dan harus ditolak. Kedua, IN dibangun dari paradigma Barat, namun dibuat seolah-olah pemikiran orisinil Indonesia. Pemantik awal kontestasi IN adalah, pemakaian langgam Jawa pada saat tilawah Al Qur'an dalam peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara (17 Mei 2015), menuai kontroversi. Bacaan tersebut dinilai menyalahi makrojul huruf dan tajwid. Selain itu, wacana IN juga disokong dengan dana yang kuat, terutama sebagai tema kajian dan penelitian di berbagai lembaga pendidikan dan pemerintahan. Misalnya penelitian yang didanai oleh kementerian agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dengan biaya masing-masing 50 juta untuk 10 orang peneliti yang proposalnya lolos seleksi. Sokongan dana tersebut, menjadi sorotan dan pertanyaan, mengapa tema kajian tersebut mendapatkan perhatian yang begitu besar, sementara masih banyak persoalan umat lain yang juga butuh solusi efektif.

Warrant dalam teks NU, retorika Islam Nusantara dibuat untuk menyempurnakan ikhtiar wacana IN dalam menjalankan fikih sesuai dengan kondisi masyarakat Nusantara, menghimbau keterlibatan pemikir elit intelektual NU (Kiai, Sesepeuh, Kader Cendekiawan dari praktisi pendidikan NU, dan seluruh neven serta badan otonom NU) untuk merumuskan pendidikan Islam Nusantara sebagai konsep ideal bangunan Islam Nusantara yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; Menjelaskan kepada para penolak Islam Nusantara bahwa Islam Nusantara mendukung pengalaman Islam dalam ekspresi budaya lokal; Menjelaskan kepada para penolak Islam Nusantara bahwa Islam Nusantara mendukung pengalaman Islam dalam ekspresi budaya lokal; Menjelaskan fakta sejarah Islam Nusantara yaitu rangkaian bukti sejarah kiprah Islam Nusantara oleh Wali Songo, Ulama, dan pesantren. *Warrant* dalam teks HTI menunjukkan bahwa konsep Islam Nusantara yang menisbatkan kepada Walisongo merupakan kedok untuk menutupi wajah sekular Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara merupakan reinkarnasi dari istilah "Islam Liberal", "Islam Moderat", "Islam Indonesia" karena berbagai label tersebut, telah dianggap gagal oleh pengusungnya, dan tidak laris lagi di kalangan Masyarakat. Sehingga dimunculkan istilah baru, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara hampir mirip dengan Islam liberal, di propagandakan oleh kelompok Islam liberal di dunia pendidikan tinggi, dengan nada kebanggaan. Namun sebaliknya, tidak bangga menyuarakan opini penegakkan syariah Islam. Oleh karena Islam Nusantara menegasi penegakkan syariah Islam, maka HTI berkepentingan untuk menegasi retorika Islam

Nusantara.

Claim dalam teks NU, Islam Nusantara adalah Islam NU yang relevan dengan NKRI, dimana santri berperan sebagai pelopor Islam Nusantara, untuk menyebarluaskan proyek akademik, budaya, dan peradaban, yang dikuatnya dengan berdiri perguruan tinggi NU dalam satu nama, yaitu Perguruan Tinggi Islam Nusantara, dan selalu mengkontekstualisasikan dalam gerak sejarah, sehingga melahirkan sistem ilmu pengetahuan yang berwatak dan berkarakter sosial-nusantara; mendorong tindakan emansipatif sebagai tugas pencerdasan, humanisasi, dan kesejahteraan sosial, serta representasi dari *rahmatan lil 'alamin*. Sementara itu, *Claim* dalam teks HTI, Islam Nusantara adalah upaya memecah belah umat, membangkitkan *ashabiyah*, dan membendung *khilafah*. Menurut HTI, Islam hanya satu. Selain itu, Islam bukan untuk bangsa Arab, tetapi agama samawi untuk seluruh manusia. Oleh karena itulah, Islam di klaim sebagai *rahmatan lil alamin*. Berdasarkan perbandingan antara Claim NU dan HTI terhadap IN, ternyata keduanya sama-sama menggunakan kata rahmatan lil alamin dalam cara pandang yang berbeda. Dalam cara pandang NU, Islam Nusantara adalah representasi dari *rahmatan lil alamin*, karena menggunakan fikih Nusantara yang mempertimbangkan kemaslahatan di dalam Nusantara tanpa menegaskan karakteristik. Dengan IN, yang selalu mengkontekstualisasikan permasalahan umat dengan kajian sejarah Islam Nusantara, dipercaya dapat melahirkan sistem ilmu pengetahuan yang berwatak dan berkarakter sosial-nusantara, sehingga mendorong tindakan emansipatif sebagai tugas pencerdasan, humanisasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Islam Nusantara merupakan proyek Islam Nusantara akademik, budaya dan peradaban, menjadi representasi *rahmatan lil 'alamin*.

Namun, HTI justru menolak IN sebagai *rahmatan lil 'alamin*, karena dapat memecah belah umat, membangkitkan *ashabiyah* (paham fanatisme terhadap kelompok), dan membendung *khilafah*. HTI menolak istilah IN karena membuat umat Islam menjadi tidak satu, sebab berimplikasi terhadap berpecahnya umat Islam dalam satu barisan, dengan cara memecahnya dengan istilah kebangsaan, sehingga fokus dan perhatian umat Islam Indonesia, hanya pada umat Islam Nusantara saja, dan mengenyampingkan umat Islam lain yang ada di seluruh dunia. Hal tersebut, merupakan siasat barat yang menginginkan tidak bersatunya umat Islam di dunia. Dengan tidak adanya kesatuan umat Islam, maka upaya mendirikan *khilafah Islamiyah* juga dengan sendirinya, tidak akan terjadi. Karena pendirian *Khilafah Islamiyah* harus dengan bersatunya umat Islam dalam satu tampuk kepemimpinan (*khilafah*).

Perbedaan Cara Pandang Elit Intelektual NU dan HTI dalam Membuat Retorika Islam Nusantara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan cara pandang, menghasilkan perbedaan tindak tutur dan cara beretorika di media baru. Cara pandang tersebut

dibentuk oleh kontekstualisasi wacana. Kontekstualisasi wacana tersebut dimaknai sebagai temuan penelitian dalam disertasi ini sebagai wacana pedagogi dan kontestasi elit intelektual. Wacana pedagogi elit intelektual tersebut, merupakan teori yang dikembangkan dari Teori Wacana Pedagogi yang dikemukakan oleh Basil Bernstein. Menurut Bernstein, wacana pedagogi yaitu kelas, kode dan kontrol. Namun dalam penelitian ini, dikembangkan menjadi Wacana Pedagogi khas Indonesia, yaitu: Wacana Pedagogi Elit Intelektual.

Wacana ini dibuat di dalam ruang/ kelas yang dikendalikan elit intelektual. Elit intelektual adalah beberapa orang yang menjadi pimpinan organisasi massa Islam dan telah mengalami proses pengkaderan sesuai dengan pedoman organisasi. Elit intelektual menggagas ide, menyusun eksplikasi dan membuat perangkat materi, sehingga gagasan ide tersebut dapat dimengerti, dan dimaknai tindak tuturnya secara lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Setelah ide tersebut disepakati oleh elit intelektual dalam makna yang seragam, maka elit intelektual menyampaikan dan meneruskan ide tersebut dalam pengajaran dan retorika yang merujuk kepada perangkat materi yang sudah disetujui bersama. Ide tersebut diteruskan, diajarkan, sampai dengan dipraktikkan. Cara penerusan ide tersebut menggunakan kata kunci atau kode yang seragam agar mudah dimengerti dan diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat pada umumnya. Selain menggunakan kata kunci, ide tersebut juga disebarkan dalam tindak tutur bermedia, melalui perangkat struktur dan non struktur dalam ormas Islam, kemudian disebarkan melalui jaringan komunikasi dalam media baru dan struktur, melalui produksi retorika teks dan simbol kepada kader dan masyarakat luas, serta terevaluasi dalam ruang elit dan intelektual. Dalam versi NU, ruangan untuk evaluasi tersebut lebih besar, karena biasanya berbentuk Mukhtamar/ Musyawarah Pimpinan Ormas, sedangkan HTI ruang untuk evaluasi tersebut lebih kecil karena lebih tertutup sifatnya.

NU selangkah lebih maju untuk membuat perangkat wacana kelas, karena di dukung oleh kekuatan dana, media, dan pemerintah. NU juga sudah membuka prodi Islam Nusantara pada STAINU Jakarta, yang sudah dibuka sebelum Mukhtamar NU ke 33. Oleh karena itu perangkat wacana kelas NU lebih sistematis, memiliki kurikulum, metode, eksplikasi teori dan pendekatan yang lebih intensif. Sedangkan HTI hanya reaksional memproduksi negasi terhadap Islam Nusantara karena dinilai akan menegasi proyek khilafah HTI bila wacana Islam Nusantara itu terus menerus diproduksi tanpa ada negasi yang tegas dari HTI.

Kedua, wacana dari NU dan HTI mengenai Islam Nusantara disampaikan melalui media pembelajaran, melalui jaringan struktur ormas dan non struktur dengan sistem jaringan, lewat tatap muka atau menggunakan media perantara, khususnya media baru, sehingga tersebar lebih luas. Untuk media perantara, HTI mengistilahkannya dengan metode duplikasi, perangkat wacana kelas yang sudah disusun elit intelektual, kemudian diperbanyak dengan berbagai metode retorika

sehingga tersebarluaskan menjadi tidak terhingga. Setelah pendistribusian wacana tersebut, maka dilakukan evaluasi, sampai sejauh mana wacana tersebut menjadi tindak tutur perlokusi, seperti yang dipahami elit. Dari evaluasi elit tersebut, kemudian diambil keputusan untuk mempertahankan kode wacana atau memodifikasi wacana tersebut, sehingga bisa menjadi tindak tutur perlokusi. Semua kontekstualisasi wacana pedagogi yang sudah diproduksi dan didistribukan, kemudian dikembalikan ke elit intelektual untuk menempuh proses siklus, atau model wacana pedagogi elit intelektual selanjutnya. Yang perlu digaris bawahi, peran elit ini tidak sendiri, mereka membentuk jaringan antar elit lain, yang dapat saling mendukung wacana masing-masing yang beririsan. Walaupun ada perbedaan pendapat di dalam tubuh elit NU, yang bisa dibaca dari media baru, namun yang dimuat dalam web NU menampilkan kebulatan suara untuk mengusung Islam Nusantara sebagai Islam NU.

Adanya perbedaan cara pandang mengenai Islam Nusantara, juga membuat cara bertutur dalam retorika Islam Nusantara terjadi kontestasi. Kontestasi wacana Islam Nusantara, membawa kepada pertentangan di dalam tubuh umat Islam, dalam memaknai istilah Islam Nusantara. Dalam disertasi ini, pertentangan tersebut, diwakili oleh ormas NU dan HTI, yang berbeda dalam membuat klaim Islam Nusantara. Oleh karena itu, keduanya memiliki nilai dan wacana yang berbeda dalam beretorika terhadap Islam Nusantara. Kontestasi dua ormas, memperlihatkan bahwa sumber masalah diantara keduanya, berasal dari perspektif yang berbeda, yang membuat keduanya saling bersaing. Pertama, mereka bersaing dalam tataran wacana di dalam pemikiran elit intelektual NU dan HTI. Kedua, kedua ormas, membawa jamaahnya ikut dalam kontestasi pro dan kontra terhadap wacana Islam Nusantara. Ketiga, kedua ormas melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontestasi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif untuk menyiarkan Islam Nusantara dan Menegasi Islam Nusantara. Keempat, mencermati karakteristik, sejarah, keyakinan, dan kebijakan kedua ormas, sulit bagi mereka untuk bersatu dalam kontestasi Islam Nusantara. Keduanya, sama-sama bersaing dan berkompetisi terhadap makna Islam Nusantara dengan membuat jaringan melalui media baru di arena wacana pedagogi. Keduanya, sama-sama menyasar kaum intelektual di perguruan tinggi untuk menarik minat para sivitas akademika untuk berpihak pada wacana Islam Nusantara atau kontra pada wacana tersebut.

Kontestasi antara ormas Islam diatas, terjadi karena Umat Islam di Indonesia bukan suatu kelompok yang monolitik. Umat Islam di Indonesia hidup dengan kemajemukan dalam berbagai tradisi, pemahaman, dan praktek keagamaan, yang merupakan ekspresi dari keislaman yang diyakininya. Pemahaman keagamaan mendorong munculnya gerakan keagamaan yang menjadi beragam ormas Islam, dimana antara satu ormas dengan ormas lainnya saling membedakan dirinya. Perbedaan tersebut ditandai dengan perbedaan dalam aspirasi pemahaman keagamaan, aktivitas keagamaan, sosial, ekonomi, dan

politik.

Menurut Haryanto (2015:42), konfigurasi sosial umat Islam di Indonesia dapat menjadi potensi pemilahan sosial yang rawan konflik. Segregasi sosial akibat pemilahan ini dapat memunculkan *cultural boundaries*. Perasaan kelompok dapat membangun sentimen kelompok yang dapat mempertegas batas budaya. Batas budaya ini, bila dipertegang, berpotensi menjadi konflik. Namun batas budaya ini juga dapat mencair dan lentur oleh tiga faktor. Factor pertama adalah intensitas interaksi. Faktor kedua adalah penerimaan. Dan factor ketiga adalah toleransi antarsatu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam penelitian ini, batas budaya yang ingin dikritisi Islam Nusantara, adalah tidak semua kebudayaan Arab adalah Islam. Oleh karena itu, Islam Nusantara ingin mengali lebih dalam ke khasan kebudayaan Islam di Nusantara. Namun karena ada beberapa caranya yang dinilai terlalu ekstrim, menyiratkan Islam Nusantara anti Arab. Hal tersebutlah yang di kritisi oleh HTI.

Dalam banyak penelitian di Indonesia, hubungan antar ormas Islam di Indonesia, mengalami dinamika relasi damai maupun relasi konflik. Belajar dari penelitian yang berdasarkan pengalaman interaksi yang damai maupun konflik tersebut, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mendorong faktor kerukunan yang dapat bekerja, serta beradaptasi untuk menciptakan kerukunan di masyarakat, khususnya kerukunan intern umat Islam. Konfigurasi umat Islam membentuk hubungan sosial yang terkait dengan konteks hubungan kelompok intern umat Islam sendiri. Kemajemukan etnis, perbedaan pandangan keagamaan, dan keragaman tradisi, dapat menjadi modal bagi perkembangan masyarakat apabila disikapi sebagai kekayaan sosial budaya. Diharapkan, keragaman ini, tidak disikapi sebagai perbedaan, melainkan dasar melakukan relasi akomodasi dan kerjasama. Bagaimanapun juga, antara NU dan HTI, sama-sama mengaku sebagai pengikut *ablul sunnah wal jama'ah*, yang mengikuti Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kontestasi Wacana Islam Nusantara Antara Elit Intelektual NU dan HTI di Media Baru

Fenomena kontestasi wacana Islam Nusantara antara NU dan HTI, merupakan kontestasi antara NU sebagai ormas Islam Indonesia yang telah melewati tiga fase hegemoni dan HTI sebagai ormas Islam Indonesia yang berusaha untuk melawan hegemoni NU. Mengacu pada Gramsci, yang mengatakan, pada masyarakat selalu terdapat pandangan dunia dan ideologi yang plural. Namun, ada kelompok yang memperoleh hegemoni kultural dan politik. Untuk itu, ada tiga fase yang diharuskan dilewati sebuah kelas untuk menjadi kelas hegemonik. Pertama melewati fase ekonomik. Kedua melewati fase politik. Dan ketiga melewati fase hegemoni. Fase ekonomik atau fase negatif, yaitu suatu momen ekonomik yang menimbulkan kesadaran kelas akan terjadinya hegemoni politik.

Fase kedua, fase politik, yaitu hubungan kekuatan politik yang menjadikan berbagai tingkat homogenitas dan kesadaran politik di dalam kelompok yang memiliki potensi hegemonik. Fase ketiga adalah fase hegemoni atau fase positif, yaitu wilayah kebebasan, dimana terjadi proses pandangan dunia baru yang mempengaruhi massa dengan pikiran dan perilaku menjadi satu pandangan dunia baru (*world view*). Fase positif disebut juga fase hegemoni ideologis, dimana terjadi suatu organisasi kesadaran yang mendominasi dalam bentuk penataan terhadap kekuatan material.

Pada fase hegemoni, suatu kelas mengembangkan solidaritas politik untuk kepentingan kelompoknya. Mereka melakukannya untuk masa kini dan masa depan, dengan cara menyentuh kepentingan kelompok subordinat lain, mengembangkan dan memperluas kepentingannya dengan memperhitungkan interes kelompok *subaltern*. Manifestasi fase ini adalah negara. Negara tidak hanya membawa kepentingan kelas yang berkuasa, tetapi menyatakan diri mewakili kepentingan umum. Negara adalah bagian dari satu kelompok dominan yang secara penuh berkoordinasi dengan kepentingan umum dan kelompok *subaltern*. Fase ini disebut fase terbentuknya blok historis, dimana terdapat suatu kelompok hegemonik yang memperluas hegemoninya meliputi seluruh kelompok *subaltern*.

NU, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, telah melewati tiga fase diatas, yaitu fase ekonomik, fase politik, dan fase hegemoni. Fase ekonomik, terjadi pada masa-masa awal NU dibentuk. Adanya situasi yang mendorong terbentuknya NU menjadi suatu keharusan. Tiga motif yang melatarbelakangi lahirnya NU, yaitu motif agama, motif nasionalisme, dan motif mempertahankan paham Aswaja, merupakan fase ekonomik yang dihadapi NU. Pada fase ini tumbuh kesadaran, para ulama Indonesia untuk melawan penjajah. NU pun berhasil melewati fase ekonomik, dengan berperan aktif dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, puncaknya adalah keluarnya resolusi jihad NU, untuk mempertahankan NKRI dari agresi militer tentara sekutu, yang ingin merampas kemerdekaan NKRI. Dan setelah Indonesia merdeka, terbentuklah partai. NU ikut terlibat di dalamnya. Pada tahap ini, NU memasuki, fase kedua, fase politik. Pada awalnya NU, bergabung dengan masyumi, namun pada 1952, NU memutuskan untuk menjadi partai politik sendiri. Walaupun pada tahun 1984, NU memutuskan untuk tidak menjadi partai politik lagi, dan kembali ke khittah 1926, namun Selama itu NU telah memasuki fase hegemoni. Pada fase ini, hegemoni NU terbentuk dalam bentuk dominasi wacana dan budaya Islam mayoritas di Indonesia.

Bentuk dominasi NU ini, bila dibaca melalui teori hegemoni Gramsci, yaitu dilakukan melalui manipulasi kultur sosial, dengan menggunakan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan nilai NU, sehingga secara sadar membuat wacana untuk dapat diterima kelas-kelas dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, sebagai norma umum dan ideologi yang berlaku secara universal yang dikenal sebagai ajaran Islam NU, di mana nilai-nilai tersebut pada

dasarnya menguntungkan NU sebagai kelas yang berkuasa.

Di sisi lain, usaha NU untuk memperluas nilai ajaran NU kepada kelas-kelas lain dalam masyarakat, mendapatkan perlawanan. Selain NU, terdapat beberapa macam ormas Islam yang berusaha melawan pengaruh hegemoni NU, dengan memunculkan beberapa pandangan dan nilai alternatif pada masyarakat, yang bertujuan untuk menentang cara pandang dominan yang melanggengkan nilai Islam NU. Perlawanan tersebut, oleh Gramsci dipandang sebagai konter hegemoni, yang merupakan bentuk penciptaan hegemoni tandingan terhadap hegemoni dominan yang ada. Perlawanan ini, dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Dalam penelitian ini, diwakili oleh HTI, dengan cara sama-sama menggunakan media baru untuk melawan wacana Islam Nusantara NU.

HTI, melalui media baru, menggunakan cara-cara non kekerasan atau paksaan dalam melawan hegemoni Islam Nusantara NU. Mereka, memulainya dengan usaha persuasi, kampanye, hingga membentuk pengajian untuk meyakinkan dan menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya mereka berada dalam wacana hegemoni oleh kelas yang dominan yang kemudian harus dilawan, karena mengandung nilai yang berbahaya dan dapat memecah belah umat. Gramsci menggambarkan, tindak tutur HTI dalam melawan wacana Islam Nusantara NU sebagai *war of position*, untuk menggambarkan gerakan konter hegemoni, yang juga berusaha memperoleh dukungan, serta meraih konsensus dari masyarakat, untuk melawan wacana Islam Nusantara. Bila sudah mendapatkan dukungan, maka akan terjadi usaha perebutan posisi dominan, antara NU dan HTI, yang digambarkan Gramsci sebagai *war of manouvre*. Namun dalam, kasus wacana Islam Nusantara, belum dapat dipandang sebagai satu bentuk revolusi politik dan sosial. Walaupun HTI berada dalam tahap *internationalist*, dimana posisi HTI, merupakan gerakan Islam Transnasional. Namun yang menarik, dalam wacana Islam Nusantara NU adalah NU ingin mempertahankan status quo nya dengan menjadikan wacana Islam Nusantara sebagai hegemoni yang menempun dua tataran proses aksi, yaitu tahap *national-popular*, dan tahap *internationalist*. Dengan didukung penuh oleh pemerintah, wacana Islam Nusantara NU menjadi wacana nasional yang populer dan NU juga tengah mengusaha mengangkat wacana Islam Nusantara untuk diperkenalkan dalam forum internasional.

Usaha aksi NU diatas, bertolak belakang dengan pendapat Gramsci yang berpendapat gerakan konter hegemoni yang efektif, lebih dahulu menggunakan lingkup nasional untuk memperoleh kekuatan massa. Apabila gerakan tersebut memiliki prasyarat untuk meraih kekuatan dari negara-negara lainnya, maka gerakan tersebut naik ke tahapan konter hegemoni kedua, sebagai gerakan *internationalist*. Dalam kasus Islam Nusantara, NU sebagai ormas Islam terbesar, ingin menyebarkan hegemoninya dengan melewati tahapan gerakan konter hegemoni. Sebagaimana gerakan lainnya, gerakan wacana Islam Nusantara NU, juga terdapat aktor utama yang memiliki peran paling utama, yaitu kaum elit

intelektual NU.

Kaum elit intelektual NU, yang pertama kali mengalami kesadaran kelas dan menyusun wacana Islam Nusantara sebagai usaha menyebarkan hegemoni kepada kelas yang lainnya. Sebagai aktor utama dalam penyebaran wacana, elit intelektual NU dan HTI merupakan gabungan dari tipe intelektual yang dikemukakan oleh Gramsci. Mereka masuk kepada tipe tradisional, karena dikenal sebagai rohaniawan, dan juga tipe intelektual otonom, karena memiliki keterikatan identitas dan kelas jamaah Nahdliyin.

Sebagai elit intelektual NU, mereka memiliki kekuasaan membuat wacana yang menjadi pokok pengetahuan dan makna, seperti yang dikemukakan (Foucault, 2007). Bagi, elit intelektual NU, wacana Islam Nusantara merupakan alat untuk mempertahankan dan memperlebar tersebarlusnya nilai-nilai Islam NU. Berdasarkan teori Foucault, yang mengatakan bahwa wacana, dan pengetahuan tidak mungkin netral dan murni. Penjelasan ilmiah mengenai Islam Nusantara, berusaha menguasai nilai ajaran Islam NU di Nusantara dan sekaligus menyingkirkan penjelasan nilai cabang ajaran Islam yang lain.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi, digunakan untuk memaksakan nilai kepada masyarakat. NU dan HTI sama-sama menggunakan teknologi, untuk menyebarkan nilai cabang Islam yang mereka pahami dan perjuangkan. Melalui media baru, kedua ormas, sama-sama menyusun, meretorikakan, dan mengarsipkan sejarah nilai dan ideologi mereka, sebagai sistem yang memapankan peristiwa atau benda bersejarah, untuk satu usaha yang sama, menguasai kehidupan sosial dan budaya.

Wacana Islam Nusantara, sebagai wacana nasional populer, juga bersaing dengan beberapa wacana lain, seperti revolusi mental. Mengacu pada Foucault (2007) yang mengatakan, wacana bukan diskursus yang apriori sebagaimana linguistik, melainkan diskursus yang fungsional dan praktis. Begitupula dengan wacana Islam Nusantara, ia adalah wacana yang bergesekan dengan wacana yang lain. Bagi NU dan HTI, wacana Islam Nusantara dapat berubah dan bertransformasi dalam sejarah. Saat ini, gagasan Islam Nusantara NU, menjadi instrumen untuk memaksakan ideologi Islam NU sebagai alat untuk berkuasa oleh NU. Sedangkan HTI, berusaha melawan wacana Islam Nusantara NU dengan cara yang persuasif melalui media baru.

PENUTUP

Retorika Islam Nusantara di Media Baru, diwacanakan oleh elit intelektual NU, ormas Islam terbesar di Indonesia. Retorika tersebut, mendapat konter wacana dari sejumlah tokoh NU dan beberapa ormas Islam di Indonesia, salah satunya adalah HTI. Dalam banyak hal, NU dan HTI terkadang memang bersilangan pendapat, salah satunya dalam Islam Nusantara. Sebagai ormas terbesar di Indonesia, walau mendapatkan perlawanan wacana dari internal dan eksternal

NU, namun elit intelektual NU tetap gencar mewacanakan Islam Nusantara sebagai wacana nasional populer.

Untuk mewacanakan Islam Nusantara sebagai wacana nasional yang populer, sejumlah usaha dilakukan NU, diantaranya adalah membuat prodi Islam Nusantara di STAINU Jakarta, membuat Museum Islam Nusantara di Pesantren Tebu Ireng, Mengadakan berbagai kompetisi penelitian mengenai Islam Nusantara dengan bantuan dana yang cukup besar untuk para peneliti yang lolos seleksi, dan berbagai usaha pedagogi lainnya. Tidak cukup dengan Islam Nusantara sebagai wacana nasional populer, NU juga mengadakan sejumlah usaha untuk mempopulerkannya pada forum Islam Internasional, salah satunya dengan mengadakan pertemuan tokoh Islam & forum miah internasional dengan sejumlah pemimpin agama, cendekiawan muslim serta pemimpin pemerintahan muslim di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan NU sebagai usaha konter hegemoni terhadap Isu Islam Timur Tengah yang sering dicap radikal. Wacana Islam Nusantara hadir untuk menampilkan wajah Islam ramah yang rahmatan lil alamin.

Sementara HTI, tetap konsisten dengan wacana khilafah dan syariah. Sebagai organisasi Islam transnasional, HTI terhubung dengan organisasi pusatnya. Segala arahan dan kebijakan yang bersifat fundamental, datang dari kantor pusat. Sedangkan yang bersifat isu atau wacana lokal, merupakan hasil dari keputusan elit intelektual HTI. Bagi HTI, wacana Islam Nusantara, bukan isu sentral, namun tetap menjadi perhatian, karena menjadi wacana nasional dan ada wacana Islam Nusantara yang tidak sejalan dengan nilai HTI, maka HTI membuat retorika tandingan. Retorika tandingan tersebut juga disampaikan dalam media baru dan juga dibuatkan kajian akademik untuk mengkritisi ide berbahaya dari wacana Islam Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. K. (2011). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf*. 1(20), 131–149.
- Akhyat. (2017). Islam Nusantara antara Ortodoksi dan Heterodoksi. *Al Tabrir*. . 17(1), 247–268.
- Astuti, H. J. P. (2017). Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*. 2 (1) : 27-51 inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/1320
- Austin, J. (1962). *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press.
- Basid, A. (2017). Islam Nusantara; Sebuah Kajian Post Tradisionalisme dan Neo Modernisme. *Tafáqqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 5(1), 1–14. jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/65
- Bitzer, L. (1986). The Rhetorical Situation. *Philosophy and Rhetoric*, 1, 1–14. [www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer\(1968\).pdf](http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf)

- Chalik, A. (2016). The Position of Islam Nusantara in Geopolitical Dinamycs of Islamic World. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(2).
jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/311
- Foucault, M. (2007). *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (1995). *Further Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. D. Boothman. London: Lawrence and Wishart.
- Kincheloe, J. L. (2005). *Critical Constructivism Primer*. New York: NY: P. Lang.
- Kincheloe, J. L., McLaren, P., & Steinberg, S. R. (2011). *Critical Pedagogy and Qualitative Research*. *Handbook Qualitative Research*, 163–177.
- Susanto, Edi, & Abadi, M. (2015). Pesantren and The Preservation of Islam Nusantara. *KARSA: The Journal of Social and Islamic Culture*, 23(2), 193–207.